

# LAPORAN KINERJA

---



2024

KPP MADYA BANDUNG | GEDUNG KEUANGAN  
NEGARA GEDUNG G, JL. ASIA AFRIKA NO. 114  
BANDUNG 40261

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian pada tahun anggaran 2024. Penyusunan LAKIN mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selama Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung telah melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung tahun 2024 yang diterjemahkan dalam Kontrak Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung tahun 2024. Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2024 merupakan capaian target kinerja yang telah ditentukan dan dijabarkan dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan, untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan yang telah direalisasikan perlu dibuat laporan yang terukur secara kuantitatif.

Semoga laporan ini dapat memberikan informasi dan gambaran yang jelas dan transparan bagi semua pihak yang berkepentingan dan sekaligus sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung di masa mendatang.

Bandung, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Madya Bandung



Ditandatangani secara elektronik  
Nandang Hidayat



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menuju terwujudnya *good governance*, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang transparan. LAKIN DJP Tahun 2024 memiliki tujuan utama sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian Rencana Strategis Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung maupun Perjanjian Kinerja 2024, sesuai dengan Laporan Nilai Kinerja Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung tahun 2024 capaian secara menyeluruh adalah **109,86** (warna hijau). Dan dari 19 IKU di tahun 2024, 19 IKU mencapai/melebihi target (hijau). Pada intinya penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan

Untuk tahun 2024, KPP Madya Bandung sudah menyusun rencana kerja sampai tingkat eselon IV, sebagai pedoman dan monitoring dalam pencapaian setiap IKU pada tahun 2024, terutama IKU-IKU yang menyangkut langsung dengan realisasi penerimaan pajak. Rencana Kerja tersebut antara lain :

1. Persentase realisasi penerimaan pajak
  - Melakukan Pengawasan Pembayaran Rutin PPh dan PPN
  - Melakukan Penerbitan STP
  - Melaksanakan strategi pengamanan penerimaan melalui Pengawasan Pembayaran Masa dan Pengawasan Kepatuhan Material
  - Mengelola pengembalian pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan
  - Menindaklanjuti pemanfaatan data Approweb tahun berjalan
  - Menindaklanjuti DSP4 Kolaboratif (DPP, DSPP, DSPC, DSPT, DSPPn)
  - Menindaklanjuti SP2DK Outstanding
  - Melakukan percepatan Pemeriksaan
  - Intensifikasi Pemeriksaan yang efektif dan tepat waktu
  - Intensifikasi Penagihan pajak
  - Peningkatan akurasi penghitungan prognosa
2. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
  - Melakukan pengawasan pembayaran rutin PPh dan PPN

- Melaksanakan penerbitan STP
  - Melakukan pemanfaatan data Aproweb tahun berjalan
  - Melakukan tindak lanjut DSP4 Kolaboratif (DPP, DSPP, DSPC, DSPT, DSPPn)
  - Melakukan tindak lanjut SP2DK Outstanding
  - Melakukan percepatan pemeriksaan
  - Melakukan manajemen atas Restitusi
  - Melaksanakan strategi pengamanan penerimaan melalui Pengawasan Pembayaran Masa dengan focus terhadap wajib pajak yang memiliki kegiatan ekonomi yang tumbuh sangat pesat antara lain sektor industri dan distributor farmasi, pelayanan Kesehatan, industri tekstil dan garment.
3. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
- Melakukan monitoring tindak lanjut atas pengawasan pembayaran masa yang dilakukan oleh *Account Representative*
  - Menindak lanjuti daftar nominatif Wajib Pajak yang harus diterbitkan STP
  - Menelaah penerbitan pemberitahuan, himbauan dan teguran untuk menyampaikan SPT
  - Menindaklanjuti daftar nominatif Dinamisasi pembayaran PPh Pasal 25
  - Menyampaikan daftar wajib pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan PPh kepada Account Representative dan Fungsional Penyuluh Pajak, untuk selanjutnya dapat ditempuh langkah formal dan non-formal untuk membantu wajib pajak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan pelaporan SPT Tahunan PPh
  - Menghubungi wajib pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan PPh melalui Whatsapp Center KPP Madya Bandung
  - Melakukan penyuluhan berupa asistensi pengisian SPT Tahunan WP OP yang dilakukan oleh Fungsional Penyuluh dengan bekerja sama dengan WP Pemberi Kerja yang terdaftar di KPP Madya Bandung
4. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis
- Memantau laporan hasil analisis data historis rasio dan capaian kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis
  - Memantau pemanfaatan daftar nominatif Wajib Pajak yang memiliki prioritas

untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi Strategis

- Melakukan *cleansing* data Wajib Pajak yang sudah tutup, pailit sehingga tidak memiliki kewajiban perpajakan dan mengusulkan untuk ditetapkan statusnya menjadi Wajib Pajak Non Efektif
  - Validasi data wajib pajak dan pemutakhiran/Update data wajib pajak sesuai kondisi lapangan
  - Koordinasi dengan Direktorat Kepatuhan Potensi dan Penerimaan dalam penetapan Wajib Pajak Wajib Strategis
  - Pembentukan grup Satgas KPP untuk memudahkan koordinasi dan secara rutin mengingatkan progress Kepatuhan SPT Tahunan PPh.
5. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
- Melaksanakan strategi penerimaan melalui penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4)
  - Melaksanakan kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penilaian dan penagihan melalui usulan DSP4 setiap triwulan
  - Menelaah penerbitan pemberitahuan, himbauan dan teguran untuk menyampaikan SPT
  - Menerbitkan LHP2DK atas SP2DK Outstanding
  - Melakukan penagihan terhadap WP yang statusnya masih "Dalam Pengawasan"
  - Menerbitkan surat teguran dan surat paksa serta tindakan penagihan lainnya atas WP yang masih mempunyai tunggakan pajak
  - Mengajukan usulan Pemsus melalui DSPP Kolaboratif
  - Melakukan percepatan penyelesaian pemeriksaan
  - Melakukan percepatan penyelesaian SP2DK/LHP2DK
6. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
- Melakukan kegiatan penyuluhan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
  - Melaksanakan kegiatan penyuluhan secara *one on one*
  - Melakukan pemetaan dan penetapan terhadap wajib pajak yang akan dilaksanakan edukasi dan penyuluhan melalui penetapan dspt kolaborasi dan dspt mandiri
  - Melaksanakan edukasi dan penyuluhan dengan metode langsung aktif one to

many (luring dan daring) untuk tema 2 sebanyak 11 kali

- Melaksanakan edukasi dan penyuluhan dengan metode langsung aktif one to one (luring) untuk tema 3 sebanyak 1 kali

7. Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

- Meminta wajib pajak mengisi survei setelah kegiatan pelayanan/penyuluhan dilaksanakan
- Setiap triwulan melakukan pembahasan terkait hasil survei pada kegiatan  
MOTIVASI

8. Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis

- Melakukan penelitian dan/atau penerbitan STP tahun berjalan sesuai dengan daftar nominatif yang muncul pada Aplikasi Approweb
- Melakukan penelitian dan penerbitan himbauan kenaikan angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan sesuai daftar nominatif yang telah ditentukan. Sampai dengan saat ini, daftar nominatif Wajib Pajak yang harus melakukan kenaikan angsuran PPh Pasal 25 belum tersedia.
- Melakukan penerbitan dan/atau penerbitan SP2DK atas data pemicu tahun berjalan

9. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis

- Menerbitkan Laporan Hasil Penelitian (LHPt), Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) yang berkuantitas dan berkualitas dan komprehensif

10. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

- Melakukan inventarisasi mandiri atas daftar nominatif yang ada dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana ditentukan dalam manual IKU

11. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

- Melaksanakan dan menyampaikan Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

12. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

- Menyelesaikan pemeriksaan tujuan lain yang menjadi tanggungjawabnya secara tepat waktu
- Melakukan monitoring penyelesaian pemeriksaan tujuan lain agar tepat waktu bersama-sama dengan komite kepatuhan melakukan penyusunan DSPP
- Menyelesaikan Pemeriksaan Khusus sesuai dengan Ketentuan yang berlaku

- Monev Kegiatan Pemeriksaan di Lingkungan KPP Madya Bandung setiap bulan
- Meningkatkan kapabilitas Fungsional Pemeriksa melalui kegiatan *In House Training* (IHT) bagi Fungsional Pemeriksa

#### 13. Tingkat efektivitas penagihan

- Melaksanakan tindakan penagihan pajak atas WP yang masih mempunyai tunggakan pajak serta memprioritaskan pencairan dan tindak lanjut WP yang ada dalam DSPC dengan tetap memperhatikan WP Non-DSPC
- Menerbitkan Surat Teguran untuk ketetapan yang telah melewati jatuh tempo
- Menerbitkan dan menyampaikan Surat Paksa
- Melakukan komunikasi dengan Wajib Pajak untuk mengidentifikasi komitmen dan kemampuan bayar Wajib Pajak

#### 14. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

- Melakukan Pembahasan oleh Kasi P3 dan Komite Kepatuhan atas usulan pemeriksaan dari Seksi Pengawasan dan khususnya yang tahun pajaknya mendekati daluwarsa penetapan

#### 15. Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan

- Memproduksi sebanyak 385 Alat keterangan dengan total poin sebesar 535,6

#### 16. Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

- Melaksanakan program ICV sesuai dengan rencana pada awal tahun kemudian di sinkronisasikan dan di laporkan sebagai kegiatan bimbingan mental sesuai dengan ND-770/PJ.11/2024
- Menugaskan pegawai calon peserta ujian kompetensi untuk mengikuti webinar
- 3. Memerintahkan seluruh pegawai untuk mengerjakan studia (ND-585/KPP.0911/2024) dan KLC (ND-647/KPP.0911/2024) untuk memenuhi jam pelatihan tatap muka pegawai pada triwulan I

#### 17. Indeks Penilaian Integritas Unit

- Membuat Laporan PIPK
- Membuat Laporan *profiling*
- Membuat LHPPU setiap bulan
- Melaksanakan atau mengikuti IHT/*Workshop/Coaching* terkait pelaksanaan tugas Kepatuhan Internal
- Menyusun dan mengirim Laporan Akhir Triwulan berisi Hasil Pemantauan Pengendalian Utama

- Mengelola pemantauan penerapan kode etik dan kode perilaku pegawai DJP

18. Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko

- Membahas identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko yang akan berdampak signifikan terhadap pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui rapat DKO
- Melakukan pembahasan terkait capaian kinerja setiap bulan

19. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

- Realisasi Anggaran telah mencapai 20% dengan capaian nilai IKPA sampai saat ini sebesar 100 % (Nilai Maksimal)pembahasan untuk mengoptimalkan pengelolaan anggaran  
Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran tepat waktu sebelum tanggal 10 setiap bulan nya

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Tugas Pokok dan Struktur Organisasi**

#### **1.1.1 Tugas Pokok**

Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung merupakan unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I, yang diresmikan berdirinya oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 2006 di Kantor Pusat DJP bersama 12 Kantor Pelayanan Pajak Madya lainnya di beberapa Kantor Wilayah, Peresmian ini merupakan perwujudan Peraturan Menteri Keuangan nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP, yang menjadi dasar pembentukan KPP Madya Bandung.

Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **1.1.2 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi KPP Madya Bandung sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Susunan organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung terdiri atas :

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Pelayanan;
- c. Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan (P3);
- d. Seksi Penjaminan Kualitas Data
- e. Seksi Pengawasan I;
- g. Seksi Pengawasan II;
- h. Seksi Pengawasan III;
- i. Seksi Pengawasan IV;
- j. Seksi Pengawasan V;

- k. Seksi Pengawasan VI; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya mengenai tugas masing-masing seksi/subbagian adalah sebagai berikut:

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

b. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

c. Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan (P3)

Mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

d. Seksi Penjaminan Kualitas Data (PKD)

Mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang

berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

e. Seksi pengawasan dan Konsultasi I, II, III, IV, V dan VI

Mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung:



## 1.2 Sumber Daya Manusia

Data sampai tanggal laporan ditandatangani, jumlah sumber daya manusia atau jumlah pegawai (PNS) di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung berjumlah 103 orang dengan perincian sebagai berikut :

Penyebaran per Seksi

Kepala Kantor	: 1 orang
Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal	: 11 orang
Seksi Pelayanan	: 18 orang
Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan	: 9 orang
Seksi Penjaminan Kualitas Data	: 4 orang
Seksi Pengawasan I	: 8 orang
Seksi Pengawasan II	: 8 orang
Seksi Pengawasan III	: 8 orang
Seksi Pengawasan IV	: 8 orang
Seksi Pengawasan V	: 8 orang
Seksi Pengawasan VI	: 8 orang
Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak	: 26 orang

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Renstra DJP disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun). Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan DJP untuk tahun 2020-2024.

Visi Direktorat Jenderal pajak adalah **“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisein, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan”**.

Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah :

- 1. Merumuskan Regulasi Perpajakan Yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Indonesia;**
- 2. Meningkatkan Kepatuhan Pajak Melalui Pelayanan Berkualitas Dan Terstandarisasi, Edukasi Dan Pengawasan Yang Efektif, Serta Penegakan Hukum Yang Adil; dan**
- 3. Mengembangkan Proses Bisnis Inti Berbasis Digital Didukung Budaya Organisasi Yang Adaptif Dan Kolaboratif Serta Aparatur Pajak Yang Berintegritas, Profesional, Dan Bermotivasi.**

Adapun Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung dalam mendukung Rencana Strategis (Renstra) DJP tahun 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan DJP. Indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang terkait tusi DJP antara lain :

- a. Rasio Perpajakan terhadap PDB
- b. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (CoreTax)

Visi Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung adalah **“Menjadi Kantor Pelayanan Yang Efektif, Efisien, dan Dipercaya Wajib Pajak Dengan Mengedepankan Integritas, Profesionalisme, dan Kualitas Layanan yang Unggul”**.

Misi **“Menghimpun Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung**

**Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Yang Mampu Menjadi Penyokong Kemandirian Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Sistem Administrasi Perpajakan Yang Efektif dan Efisien”.**

### **2.1.1 Sasaran**

Sasaran strategis Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung dijabarkan dalam beberapa Inisiatif Strategis, Penjabaran Sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif
6. Pengawasan kepatuhan material yang efektif
7. Penegakan hukum yang efektif
8. Data dan Informasi yang berkualitas
9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
10. Pengelolaan keuangan yang akuntable

### **2.1.2 Program**

Sebagai implementasi dari kebijakan di atas maka ditentukan program-program sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 yaitu:

1. Persentase realisasi penerimaan pajak
2. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
3. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
4. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis

5. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
6. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
7. Indeks kepuasan pelayanan dan efektifitas penyuluhan
8. Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis
9. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis
10. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
11. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
12. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
13. Tingkat efektivitas penagihan
14. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
15. Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan
16. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM
17. Indeks Penilaian Integritas Unit
18. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
19. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

## **2.2 Penetapan Kinerja**

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada, guna mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan kebijaksanaan dan program yang telah ditentukan. Terdapat 19 kegiatan yang ditetapkan untuk melaksanakan program-program di atas, yakni sebagai berikut:

1. Persentase realisasi penerimaan pajak
  - Melakukan Pengawasan Pembayaran Rutin PPh dan PPN
  - Melakukan Penerbitan STP
  - Melaksanakan strategi pengamanan penerimaan melalui Pengawasan Pembayaran Masa dan Pengawasan Kepatuhan Material
  - Mengelola pengembalian pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan
  - Menindaklanjuti pemanfaatan data Approweb tahun berjalan
  - Menindaklanjuti DSP4 Kolaboratif (DPP, DSPP, DSPC, DSPT, DSPPn)
  - Menindaklanjuti SP2DK Outstanding

- Melakukan percepatan pemeriksaan
2. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
- Melakukan pengawasan pembayaran rutin PPh dan PPN
  - Melaksanakan penerbitan STP
  - Melakukan pemanfaatan data Approweb tahun berjalan
  - Melakukan tindak lanjut DSP4 Kolaboratif (DPP, DSPP, DSPC, DSPT, DSPPn)
  - Melakukan tindak lanjut SP2DK Outstanding
  - Melakukan percepatan pemeriksaan
  - Melakukan manajemen atas Restitusi
  - Intensifikasi Pemeriksaan yang efektif dan tepat waktu
  - Intensifikasi Penagihan pajak
  - Peningkatan akurasi penghitungan prognosa
3. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
- Melakukan monitoring tindak lanjut atas pengawasan pembayaran masa yang dilakukan oleh *Account Representative*
  - Menindak lanjuti daftar nominatif Wajib Pajak yang harus diterbitkan STP
  - Menelaah penerbitan pemberitahuan, himbauan dan teguran untuk menyampaikan SPT
  - Menindaklanjuti daftar nominatif Dinamisasi pembayaran PPh Pasal 25
  - Menyampaikan daftar wajib pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan PPh kepada Account Representative dan Fungsional Penyuluh Pajak, untuk selanjutnya dapat ditempuh langkah formal dan non-formal untuk membantu wajib pajak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan pelaporan SPT Tahunan PPh
  - Menghubungi wajib pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan PPh melalui Whatsapp Center KPP Madya Bandung
  - Melakukan penyuluhan berupa asistensi pengisian SPT Tahunan WP OP yang dilakukan oleh Fungsional Penyuluh dengan bekerja sama dengan WP Pemberi Kerja yang terdaftar di KPP Madya Bandung
4. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis
- Memantau laporan hasil analisis data historis rasio dan capaian kepatuhan

penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis

- Memantau pemanfaatan daftar nominatif Wajib Pajak yang memiliki prioritas untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi Strategis
  - Melakukan *cleansing* data Wajib Pajak yang sudah tutup, pailit sehingga tidak memiliki kewajiban perpajakan dan mengusulkan untuk ditetapkan statusnya menjadi Wajib Pajak Non Efektif
  - Validasi data wajib pajak dan pemutakhiran/Update data wajib pajak sesuai kondisi dilapangan
  - Koordinasi dengan Direktorat Kepatuhan Potensi dan Penerimaan dalam penetapan Wajib Pajak Wajib Strategis
  - Pembentukan grup Satgas KPP untuk memudahkan koordinasi dan secara rutin mengingatkan progress Kepatuhan SPT Tahunan PPh.
5. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
- Melaksanakan strategi penerimaan melalui penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4)
  - Melaksanakan kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penilaian dan penagihan melalui usulan DSP4 setiap triwulan
  - Menelaah penerbitan pemberitahuan, himbauan dan teguran untuk menyampaikan SPT
  - Menerbitkan LHP2DK atas SP2DK Outstanding
  - Melakukan penagihan terhadap WP yang statusnya masih "Dalam Pengawasan"
  - Menerbitkan surat teguran dan surat paksa serta tindakan penagihan lainnya atas WP yang masih mempunyai tunggakan pajak
  - Mengajukan usulan Pemsus melalui DSPP Kolaboratif
  - Melakukan percepatan penyelesaian pemeriksaan
  - Melakukan percepatan penyelesaian SP2DK/LHP2DK
6. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
- Melakukan kegiatan penyuluhan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
  - Melaksanakan kegiatan penyuluhan secara *one on one*
  - Melakukan pemetaan dan penetapan terhadap wajib pajak yang akan

dilaksanakan edukasi dan penyuluhan melalui penetapan dspt kolaborasi dan dspt mandiri

- Melaksanakan edukasi dan penyuluhan dengan metode langsung aktif one to many (luring dan daring) untuk tema 2 sebanyak 11 kali
  - Melaksanakan edukasi dan penyuluhan dengan metode langsung aktif one to one (luring) untuk tema 3 sebanyak 1 kali
7. Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan
- Meminta wajib pajak mengisi survei setelah kegiatan pelayanan/penyuluhan dilaksanakan
  - Setiap triwulan melakukan pembahasan terkait hasil survei pada kegiatan MOTIVASI
8. Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis
- Melakukan penelitian dan/atau penerbitan STP tahun berjalan sesuai dengan daftar nominatif yang muncul pada Aplikasi Approweb
  - Melakukan penelitian dan penerbitan himbauan kenaikan angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan sesuai daftar nominatif yang telah ditentukan. Sampai dengan saat ini, daftar nominatif Wajib Pajak yang harus melakukan kenaikan angsuran PPh Pasal 25 belum tersedia.
  - Melakukan penerbitan dan/atau penerbitan SP2DK atas data pemicu tahun berjalan
9. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis
- Menerbitkan Laporan Hasil Penelitian (LHPt), Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) yang berkuantitas dan berkualitas dan komprehensif
10. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
- Melakukan inventarisasi mandiri atas daftar nominatif yang ada dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana ditentukan dalam manual IKU
11. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
- Melaksanakan dan menyampaikan Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
12. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
- Menyelesaikan pemeriksaan tujuan lain yang menjadi tanggungjawabnya secara tepat waktu

- Melakukan monitoring penyelesaian pemeriksaan tujuan lain agar tepat waktu berama-sama dengan komite kepatuhan melakukan penyusunan DSPP
- Menyelesaikan Pemeriksaan Khusus sesuai dengan Ketentuan yang berlaku
- Monev Kegiatan Pemeriksaan di Lingkungan KPP Madya Bandung setiap bulan
- Meningkatkan kapabilitas Fungsional Pemeriksa melalui kegiatan *In House Training* (IHT) bagi Fungsional Pemeriksa

#### 13. Tingkat efektivitas penagihan

- Melaksanakan tindakan penagihan pajak atas WP yang masih mempunyai tunggakan pajak serta memprioritaskan pencairan dan tindak lanjut WP yang ada dalam DSPC dengan tetap memperhatikan WP Non-DSPC
- Menerbitkan Surat Teguran untuk ketetapan yang telah melewati jatuh tempo
- Menerbitkan dan menyampaikan Surat Paksa
- Melakukan komunikasi dengan Wajib Pajak untuk mengidentifikasi komitmen dan kemampuan bayar Wajib Pajak

#### 14. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

- Melakukan Pembahasan oleh Kasi P3 dan Komite Kepatuhan atas usulan pemeriksaan dari Seksi Pengawasan dan khususnya yang tahun pajaknya mendekati daluwarsa penetapan

#### 15. Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan

- Memproduksi sebanyak 385 Alat keterangan dengan total poin sebesar 535,6

#### 16. Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

- Melaksanakan program ICV sesuai dengan rencana pada awal tahun kemudian di sinkronisasikan dan di laporkan sebagai kegiatan bimbingan mental sesuai dengan ND-770/PJ.11/2024
- Menugaskan pegawai calon peserta ujian kompetensi untuk mengikuti webinar
- 3. Memerintahkan seluruh pegawai untuk mengerjakan studia (ND-585/KPP.0911/2024) dan KLC (ND-647/KPP.0911/2024) untuk memenuhi jam pelatihan tatap muka pegawai pada triwulan I

#### 17. Indeks Penilaian Integritas Unit

- Membuat Laporan PIPK
- Membuat Laporan *profiling*
- Membuat LHPPU setiap bulan
- Melaksanakan atau mengikuti IHT/*Workshop/Coaching* terkait pelaksanaan

tugas Kepatuhan Internal

- Menyusun dan mengirim Laporan Akhir Triwulan berisi Hasil Pemantauan Pengendalian Utama
- Mengelola pemantauan penerapan kode etik dan kode perilaku pegawai DJP

18. Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko

- Membahas identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko yang akan berdampak signifikan terhadap pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui rapat DKO
- Melakukan pembahasan terkait capaian kinerja setiap bulan

19. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

- Realisasi Anggaran telah mencapai 20% dengan capaian nilai IKPA sampai saat ini sebesar 100 % (Nilai Maksimal)pembahasan untuk mengoptimalkan pengelolaan anggaran

Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran tepat waktu sebelum tanggal 10 setiap bulan nya

### **2.3 Faktor-Faktor Keberhasilan Pencapaian**

Faktor Keberhasilan adalah faktor penentu keberhasilan yang mencakup berbagai bidang/aspek dari misi yang sangat mempengaruhi kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.

Adapun faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut adalah sebagai berikut :

- Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai dalam rangka pelaksanaan tugas.
- Adanya sistem pendukung dan ketentuan perundang-undangan perpajakan guna meningkatkan pelayanan sehingga mengurangi keraguan masyarakat terhadap kinerja aparatur negara.
- Melaksanakan strategi pengamanan penerimaan melalui penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4)
- Melaksanakan penyuluhan secara berkala setiap terbit peraturan atau kebijakan baru dan melakukan penyuluhan pengisian SPT Tahunan melalui efilling baik Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan tahun 2023 dan tahun 2022. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut diperoleh data Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung sebagai berikut :

No	Deskripsi	Indeks Capaian 2022	Indeks Capaian 2023	Indeks Capaian 2024
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	108,60	102,12	100,12
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	106,02	110,04	104,30
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	107,73	104,70	100,07
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis	100,00	100,28	119,04
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	113,79	77,42	100,51
6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	120,00	120,00	120,00
7	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	113,72	120,00	106,45
8	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	118,72	120,00	120,00
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	120,00	120,00	120,00
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	120,00	119,84

11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	120,00
12	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	120,00	120,00	120,00
13	Tingkat efektivitas penagihan	120,00	120,00	120,00
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	100,00
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	-	120,00	120,00
16	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	105,88	114,94	117,49
17	Indeks Penilaian Integritas Unit	111,80	112,12	114,94
18	Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan	111,11	111,11	111,11
19	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	99,31	109,36	120,00

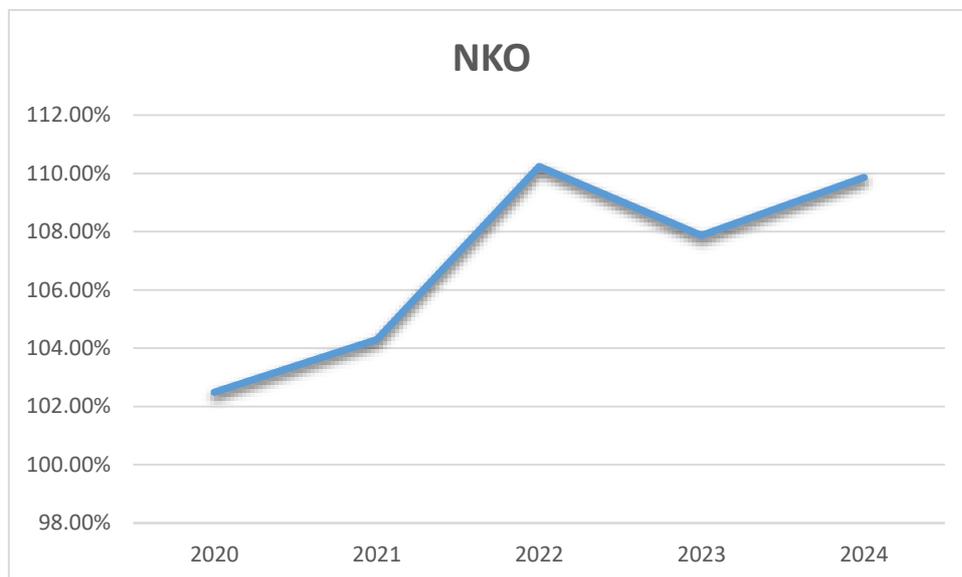
Sesuai dengan Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Madya Bandung tahun 2024 yang telah disampaikan ke Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I, capaian secara menyeluruh adalah **109,86** (warna hijau). Dari 19 IKU di tahun 2024 19 IKU mencapai/melebihi target (hijau). Tabel lengkap IKU 2024, target beserta realisasinya disajikan sebagai berikut:

**NILAI KINERJA ORGANISASI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANWIL DJP JAWA BARAT I**  
**KPP MADYA BANDUNG**  
**TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<b>Stakeholder Perspective</b>							<b>30,00%</b>	<b>101,89</b>
<b>1</b>	<b>Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal</b>							<b>101,89</b>
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,12%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,12
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	104,30	Max	P/L	19,00%	42,22%	104,30
<b>Customer Perspective</b>							<b>20,00%</b>	<b>104,30</b>
<b>2</b>	<b>Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi</b>							<b>108,08</b>
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,07%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,07
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	119,04%	Max	P/L	19,00%	42,22%	119,04
<b>3</b>	<b>Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi</b>							<b>100,51</b>
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,51%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,51
<b>Internal Process Perspective</b>							<b>25,00%</b>	<b>117,17</b>
<b>4</b>	<b>Edukasi dan pelayanan yang efektif</b>							<b>113,23</b>
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	106,45%	Max	E/M	21,00%	50,00%	106,45
<b>5</b>	<b>Persentase pengawasan pembayaran masa</b>							<b>120,00</b>
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90,00%	118,16%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
<b>6</b>	<b>Pengujian kepatuhan material yang efektif</b>							<b>119,94</b>
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,84%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,84
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
<b>7</b>	<b>Penegakan hukum yang efektif</b>							<b>112,69</b>
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00

7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	119,35%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	<b>Data dan informasi yang berkualitas</b>							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>							25,00%	116,55
9	<b>Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif</b>							113,09
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,49	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,49
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	94,11	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,72
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	100,00	Max	P/M	14,00%	33,33%	111,11
10	<b>Pengelolaan keuangan yang akuntabel</b>							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>								109,86

\* Nilai Kinerja Organisasi (NKO) ini telah sesuai dengan Dashboard NKO di Aplikasi Mandor



Bila dibandingkan dengan nilai capaian tahun 2023, capaian NKO Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung tahun 2024 mengalami Kenaikan sebesar 1,99%. Salah satu faktor yang menyebabkan naiknya Nilai Kinerja Organisasi KPP Madya Bandung pada tahun 2024 adalah karena 19 IKU mencapai/melebihi target (hijau) dari 19 IKU yang ada.

Penjelasan mengenai upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja, penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, efisiensi penggunaan sumber daya, program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, disajikan sebagai berikut:

### Penjelasan Capaian IKU 2024

No	Deskripsi	Indeks Capaian 2024	PIC	Hal yang dapat mendukung tercapainya rencana/target atau alasan tidak tercapainya target	Kendala yang dihadapi dalam capaian IKU 2024	Langkah yang telah diambil untuk Rencana strategis agar IKU 2024 tercapai
1.	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,12	Seksi Pengawasan, Seksi Pemeriksaan Penilaian dan Penagihan (P3), dan Seksi Penjaminan Kualitas Data	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penggalian potensi Pajak sektoral antara lain: Industri Farmasi, Industri Tekstil, Perdagangan Besar yang berhubungan makanan dan minuman, Perdagangan Besar yang berhubungan dengan farmasi, dan Perdagangan Eceran.</li> <li>Intensifikasi Pemeriksaan yang efektif dan tepat waktu.</li> <li>Intensifikasi Penagihan pajak.</li> </ol>	Target penerimaan KPP Madya Bandung Tahun 2024 sebesar Rp8.259.171.802.000 dengan pertumbuhan target sebesar 12,20%. Sedangkan capaian sampai dengan triwulan IV sebesar 100,12% dengan pertumbuhan netto sebesar 11,81%, sehingga telah mencapai target APBN maupun target Perpres.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan Pengawasan Pembayaran Rutin PPh dan PPN</li> <li>Melakukan Penerbitan STP</li> <li>Melaksanakan strategi pengamanan penerimaan melalui Pengawasan Masa dan Pengawasan Kepatuhan Material</li> <li>Mengelola pengembalian pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan</li> <li>Menindaklanjuti pemanfaatan data Approweb tahun berjalan</li> <li>Menindaklanjuti DSP4 Kolaboratif (DPP, DSPP, DSPPC, DSPT, DSPPn)</li> <li>Menindaklanjuti SP2DK Outstanding</li> <li>Melakukan percepatan pemeriksaan</li> </ol>
2.	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	104,30	Seksi Pengawasan dan Seksi Penjaminan Kualitas Data	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penggalian potensi Pajak sektoral antara lain: Industri Farmasi, Industri Tekstil, Perdagangan Besar yang berhubungan makanan dan minuman, Perdagangan Besar yang berhubungan dengan farmasi, dan Perdagangan Eceran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengawasan Pembayaran Rutin PPh dan PPN</li> <li>Penerbitan STP</li> <li>Pemanfaatan data Approweb tahun berjalan</li> <li>Menindaklanjuti DSP4 Kolaboratif (DPP, DSPP, DSPPC, DSPT, DSPPn)</li> </ol>

				<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Intensifikasi Pemeriksaan yang efektif dan tepat waktu</li> <li>3. Intensifikasi Penagihan pajak</li> <li>4. Peningkatan akurasi penghitungan prognosa</li> <li>5. Manajemen Restitusi dan Pengembalian Pendahuluan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Deviasi prognosa penerimaan di atas batas 10%</li> <li>3. Tidak berulangnya penerimaan PPh Tahunan OP yang bersumber dari pengalihan saham pada tahun 2023</li> <li>4. Tidak berulangnya penerimaan yang bersumber dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS)</li> <li>5. Kurang akuratnya penghitungan prognosa pencairan restitusi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Menindaklanjuti SP2DK Outstanding</li> <li>6. Percepatan pemeriksaan</li> <li>7. Penggalan potensi Pajak sektoral antara lain: Industri Farmasi, Industri Tekstil, Perdagangan Besar yang berhubungan makanan dan minuman, Perdagangan Besar yang berhubungan dengan farmasi, dan Perdagangan Eceran</li> <li>8. Intensifikasi Pemeriksaan yang efektif dan tepat waktu</li> <li>9. Intensifikasi Penagihan pajak</li> <li>10. Peningkatan akurasi penghitungan prognosa</li> </ol>
				Target telah tercapai		
3.	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,07	Seksi Pengawasan, Seksi Penjaminan Kualitas Data	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan monitoring tindak lanjut atas pengawasan pembayaran masa yang dilakukan oleh Account Representative</li> <li>2. Menindak lanjuti daftar nominatif Wajib Pajak yang harus diterbitkan STP</li> <li>3. Menelaah penerbitan pemberitahuan, himbauan dan teguran untuk menyampaikan SPT</li> <li>4. Menindaklanjuti daftar nominative Dinamisasi pembayaran PPh Pasal 25</li> <li>5. Menyampaikan daftar wajib pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan PPh kepada Account Representative dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Target Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sebesar Rp7.372.431.314.000,-</li> <li>2. Realisasi IKU penerimaan pajak dari kegiatan PPM pada triwulan IV ini sebesar Rp7.377.926.543.960 dengan capaian sebesar 100,07%</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah dilakukan penelitian/penerbitan STP tahun berjalan sesuai dengan dafnom yang muncul pada Aplikasi Approweb</li> <li>2. Melakukan pengecekan secara mandiri atas data pemicu tahun berjalan dan daftar nominatif oleh AR secara periodik</li> <li>3. Menghubungi wajib pajak melalui Whatsapp Center KPP Madya Bandung untuk mengingatkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pemenuhan kewajiban perpajakan pelaporan SPT Tahunan PPh.</li> <li>4. Menghubungi contact person WP yang belum</li> </ol>

				<p>Fungsional Penyuluh Pajak, untuk selanjutnya dapat ditempuh langkah formal dan non-formal untuk membantu wajib pajak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan pelaporan SPT Tahunan PPh</p> <p>6. Menghubungi wajib pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan PPh melalui Whatsapp Center KPP Madya Bandung</p> <p>7. Melakukan penyuluhan berupa asistensi pengisian SPT Tahunan WP OP yang dilakukan oleh Fungsional Penyuluh dengan bekerja sama dengan WP Pemberi Kerja yang terdaftar di KPP Madya Bandung</p>		<p>menyampaikan SPT Tahunan jika masih menghadapi kendala</p> <p>5. Menyediakan data rekap WP OP yang belum melaporkan SPT Tahunan</p>
				<p>Target telah tercapai</p>		
4.	<p>Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis</p>	119,04	<p>Seksi Pelayanan, Seksi Pengawasan</p>	<p>1. WP yang belum menyampaikan SPT untuk dilakukan pengecekan kembali atas proses permohonan penundaan dan penghitungan tahun buku</p> <p>2. AR menerbitkan Surat Tegoran dan STP dalam hal WP terlambat dalam melapor</p> <p>3. Fungsional Penyuluh dan AR koordinasi untuk melakukan edukasi one on one dan imbauan penyampaian SPT</p>	<p>1. Realisasi IKU Kepatuhan SPT Tahunan pada triwulan IV ini sebesar 120% dengan capaian sebesar 120%.</p> <p>2. Dari 1732 WP Wajib SPT yang sudah menyampaikan SPT sebanyak 1.745 WP, semua WP Wajib SPT telah menyampaikan SPT Tahunan</p>	<p>1. Memantau laporan hasil analisis data historis rasio dan capaian kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis</p> <p>2. Memantau pemanfaatan daftar nominatif Wajib Pajak yang memiliki prioritas untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi Strategis</p> <p>3. Melakukan cleansing data Wajib Pajak yang sudah tutup, pailit sehingga tidak memiliki kewajiban perpajakan dan</p>

				Taget telah tercapai		<p>mengusulkan untuk ditetapkan statusnya menjadi Wajib Pajak Non Efektif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Validasi data wajib pajak dan pemutakhiran/Update data wajib pajak sesuai kondisi dilapangan</li> <li>Koordinasi dengan Direktorat Kepatuhan Potensi dan Penerimaan dalam penetapan Wajib Pajak Wajib Strategis</li> <li>Pembentukan grup Satgas KPP untuk memudahkan koordinasi dan secara rutin mengingatkan progress Kepatuhan SPT Tahunan PPh</li> </ol>
5.	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,51	Seksi Pengawasan dan Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan ( P3)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seksi Pengawasan dan Account Representative untuk menjaga pembayaran Wajib Pajak pada tiap Triwulan</li> <li>Memaksimalkan potensi besar yang tersedia dari kegiatan Pemeriksaan dan Penagihan</li> <li>Optimalisasi kinerja komite kepatuhan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Realisasi PKM Triwulan IV sebesar Rp 891.086.819.072 atau sebesar 100,49% dari target trajectory Q4 yakni 100%, yang terdiri dari PKM Pengawasan sebesar Rp258.773.192.190, PKM Edukasi Rp3,543,973,382 dan PKM P2 sebesar Rp 682.777.653.500</li> <li>Realisasi PKM Pengawasan telah mencapai target trajectory Q4 dengan capaian sebesar 100,49%</li> <li></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menerbitkan LHP2DK atas SP2DK Outstanding</li> <li>Melakukan penagihan terhadap WP yang statusnya masih "Dalam Pengawasan"</li> <li>Menerbitkan surat teguran dan surat paksa serta tindakan penagihan lainnya atas WP yang masih mempunyai tunggakan pajak</li> <li>Mengajukan usulan Pemsus melalui DSPP Kolaboratif</li> <li>Melakukan percepatan penyelesaian pemeriksaan</li> <li>Menguji keandalan kualitas data</li> <li>Melakukan bedah WP</li> <li>Menyelesaikan DPP Triwulan I dan triwulan berikutnya</li> <li>Percepatan penyelesaian LHP2DK</li> <li>Melakukan percepatan penyelesaian pemeriksaan</li> </ol>

				dampak negatif terhadap kinerja AR		<ul style="list-style-type: none"> <li>11. Menerbitkan surat teguran dan surat paksa serta tindakan penagihan lainnya atas WP yang masih mempunyai tunggakan pajak</li> <li>12. Menguji keandalan kualitas data</li> <li>13. Melakukan bedah WP</li> <li>14. Menyelesaikan DPP Triwulan I dan triwulan berikutnya</li> <li>15. Percepatan penyelesaian LHP2DK</li> <li>16. Melakukan percepatan penyelesaian pemeriksaan</li> <li>17. Menerbitkan surat teguran dan surat paksa serta tindakan penagihan lainnya atas WP yang masih mempunyai tunggakan pajak</li> <li>18. Setiap usulan pemeriksaan pada DSP4 Kolaboratif sudah dilengkapi oleh KKA (Kertas Kerja Analisis).</li> </ul>
6.	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	120,00	Seksi Pelayanan dan Fungsional Penyuluh	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sudah melakukan pemetaan dan penetapan terhadap wajib pajak yang akan dilaksanakan edukasi dan penyuluhan melalui penetapan dspt kolaborasi dan dspt mandiri</li> <li>2. Sudah melaksanakan edukasi dan penyuluhan dengan metode langsung aktif one to many (luring dan daring) untuk tema 2 sebanyak 11 kali</li> </ul>	Realisasi IKU pada Q4 ini sebesar 120,00% dan diakui 100% dengan capaian sebesar 120%.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Menyegerakan pelaksanaan edukasi dan penyuluhan metode langsung aktif one to one (luring dan daring) tema 3 dari sisa dspt kolaborasi yang belum dilakukan</li> <li>2. Melaksanakan edukasi dan penyuluhan metode langsung aktif one to many daring tema 2 dengan mengambil judul peraturan PMK/SE baru yang harus segera disampaikan kepada wp</li> </ul>

				<p>3. Sudah melaksanakan edukasi dan penyuluhan dengan metode langsung aktif one to one (luring) untuk tema 3 sebanyak 1 kali</p> <p>Target telah tercapai.</p>		<p>3. Menyegerakan input hasil edukasi dan penyuluhan ke dalam aplikasi sisuluh sebelah jatuh tempo</p>
7.	Indeks kepuasan Pelayanan dan efektivitas Penyuluhan	106,45	Seksi Pelayanan	<p>Melakukan survei kepuasan layanan secara mandiri untuk menilai dan menerima feedback masyarakat atas pelayanan dan penyuluhan yang diberikan oleh unit kerja pada triwulan.</p> <p>Target telah tercapai.</p>	<p>Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan survei kepuasan layanan masyarakat atas seluruh layanan pada seluruh unit kerja secara berkala, yaitu setiap tahun. Namun, pelaksanaan survei yang hanya satu tahun sekali menyebabkan kurang relevannya bahan evaluasi bagi unit kerja, sehingga unit kerja perlu melaksanakan survei kepuasan layanan dalam frekuensi yang lebih banyak.</p>	<p>1. Melaksanakan survei kepuasan layanan masyarakat secara mandiri untuk penilaian atas pelayanan tatap muka, pelayanan tanpa tatap muka, serta kegiatan penyuluhan setiap triwulan.</p> <p>2. Melakukan publikasi dan rekapitulasi atas hasil survei, untuk selanjutnya dijadikan bahan evaluasi atas pemberian layanan dan penyuluhan kedepannya.</p>
8.	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	120,00	Seksi Pengawasan,	<p>1. Melakukan pengecekan mandiri atas data pemicu tahun berjalan dan daftar nominatif STP oleh Account Representative secara berkala minimal satu minggu sekali.</p> <p>2. Menindaklanjuti dafnom Wajib Pajak yang perlu dilakukan penelitian dinamisasi PPh Pasal 25 sesuai dengan Nota Dinas yang telah diterbitkan oleh Kanwil</p> <p>3. Atas pembayaran terlambat namun belum</p>	<p>Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis terdiri dari:</p> <p>1. Tindak Lanjut atas Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti,</p> <p>2. Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25</p> <p>3. Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.</p> <p>4. IKU STP, dari dafnom ada yang tidak dapat mencapai 100% dan</p>	<p>1. Penelitian dan/atau penerbitan STP tahun berjalan sesuai dengan daftar nominatif yang muncul pada Aplikasi Approweb</p> <p>2. Penelitian dan penerbitan himbuan kenaikan angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan sesuai daftar nominatif yang telah ditentukan. Sampai dengan saat ini, daftar nominatif Wajib Pajak yang harus melakukan kenaikan angsuran PPh Pasal 25 belum tersedia.</p>

				<p>ada pelaporan SPT, kepada wajib pajak diminta untuk menyampaikan SPT dan/atau pembetulan SPT dan melaporkan SSP tersebut</p> <p>4. Melakukan penelitian terhadap wajib pajak yang termasuk ke dalam daftar nominatif dinamisasi PPh Pasal 25</p>	<p>terhitung menjadi realisasi iKU karena terdapat beberapa dafnom yang besaran Rupiahnya kurang dari 100rb sehingga terdapat AR yang sudah menerbitkan STP sesuai dafnom namun tidak bisa meraih realisasi 100%.</p> <p>5. WP terlambat melakukan pembayaran, dan masuk dafnom STP namun AR tidak dapat menindaklanjuti dafnom tersebut karena WP akan melaksanakan pembetulan.</p> <p>Tidak terdapat notifikasi jika muncul data pemicu dan daftar nominatif STP baru sehingga rentan terlewat atau terlambat ditindaklanjuti. Capaian IKU Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis telah melebihi target yang ditetapkan. Capaian tersebut dilakukan dengan menindaklanjuti dafnom STP yang tersedia. Namun Dafnom STP berdasarkan data keterlambatan pembayaran dapat belum ditindaklanjuti dengan alasan wajib pajak belum menyampaikan SPT ( SSP/ keterlambatan Pembayaran</p>	<p>3. Penerbitan dan/atau penerbitan SP2DK atas data pemicu tahun berjalan.</p> <p>4. Melakukan pengecekan mandiri atas data pemicu tahun berjalan dan daftar nominatif STP oleh Account Representative secara berkala minimal satu minggu sekali.</p>
			<p>Target telah tercapai.</p>			

					belum digunakan pada SPT). Selain itu, terdapat dafnom Dinamisasi PPh Pasal 25 dengan perkiraan perhitungan PPh terutang tidak lebih dari 150%	
9.	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	120,00	Seksi Pengawasan	<p>1. Menyusun Tim Pemantauan IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis (P4DK) untuk memantau penyelesaian tunggakan SP2DK outstanding dan penyelesaian LHP2DK lebih berkualitas dan mendukung pencapaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)</p> <p>2. Melakukan monitoring dan evaluasi P4DK setiap bulan dan di Seksi Pengawasan setiap minggu</p>	<p>1. Realisasi kegiatan P4dk sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 120,00%</p> <p>2. Sempitnya waktu untuk mengusulkan/menyetujui (adjustment) WP DPP Triwulan berikutnya sehingga WP DPP potensial tidak dapat di eksekusi dengan maksimal</p> <p>3. WP DPP yang Top Down memiliki potensi yang kurang untuk mendorong penerimaan</p> <p>4. Sosialisasi DPP yang terlambat, sehingga mengganggu kinerja AR</p>	<p>1. Menerbitkan P4DK atas SP2DK outstanding</p> <p>2. Inventarisasi data SP2DK Outstanding dan SP2DK dari DPP</p> <p>3. WP termasuk DPP yang terdapat data TP harus bisa direalisasikan LHPT-nya</p> <p>4. Semua data pemicu agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin</p> <p>5. Percepatan penyelesaian LHP2DK</p> <p>6. Melakukan monitoring dan evaluasi P4DK setiap bulan dan di Seksi Pengawasan setiap minggu</p> <p>7. Penyelesaian data SP2DK Outstanding dan penyelesaian SP2DK dari DPP lebih cepat dan berkualitas</p> <p>8. DPP yang terdapat data TP agar direalisasikan LHPT-nya</p> <p>9. Semua data pemicu agar dapat dimanfaatkan secara maksimal</p> <p>10. Percepatan penyelesaian LHP2DK</p>
				Target telah tercapai.		

10.	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	119,84	Seksi Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pengecekan mandiri atas data pemicu tahun berjalan dan daftar nominatif STP oleh Account Representative secara berkala minimal satu minggu sekali.</li> <li>Menentukan DPP untuk diterbitkan LHPt/SP2DK kepada wajib pajak yang memiliki data pemicu selain tahun berjalan</li> <li>Menerbitkan himbauan terkait data pemicu kepada wajib pajak yang tidak termasuk ke dalam DPP untuk penerbitan LHPt/SP2DK</li> </ol>	Daftar nominatif STP selain tahun berjalan belum tersedia secara khusus pada Aplikasi Approweb.	Melakukan invenatrisasi mandiri atas daftar nominatif yang ada dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana ditentukan dalam manual IKU.
				Target telah tercapai.		
11.	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	120,00	Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan dan menyampaikan Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu</li> </ol>	<p>Terdapat 3 komponen utama yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan pelaksanaan tugas komite kepatuhan wajib pajak KPP tepat waktu</li> <li>Kualitas pelaksanaan komite kepatuhan</li> <li>Presentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan dan menyampaikan Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu pada triwulan IV</li> <li>Melakukan monev triwulanan terkait Penyiapan Bahan Baku Pemeriksaan terhadap Target PKM Pemeriksaan</li> </ol>
12.	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	120,00	Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan, Fungsional Pemeriksaa Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengawasan kegiatan pemeriksaan khusus melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi secara berkala.</li> <li>Percepatan penyelesaian pemeriksaan sebelum jangka waktu pemeriksaan berakhir</li> </ol>	<p>Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur melalui 5 variabel yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Persentase nilai skp terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi (Target 75%, Bobot 15%)*</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyelesaikan Pemeriksaan Khusus sesuai dengan Ketentuan yang berlaku</li> <li>Monev Kegiatan Pemeriksaan di Lingkungan KPP Madya Bandung setiap bulan</li> <li>Pengawasan kegiatan pemeriksaan khusus melalui</li> </ol>

				<p>atau melakukan perpanjangan pemeriksaan</p> <p>3. Temuan yang menjadi koreksi hasil pemeriksaan memiliki dasar yang kuat dan disampaikan secara persuasif kepada Wajib Pajak untuk meminimalisir terjadinya sengketa</p> <p>4. Data Potensi DSPP yang dijadikan dasar adalah data yang diusulkan dan disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pemeriksaan, maka perlu menghimbau kepada AR / pihak yang akan mengusulkan pemeriksaan DSPP agar mengusulkan potensi DSPP dengan dasar analisis yang kuat.</p>	<p>c. Persentase nilai skp disetujui dibandingkan dengan nilai skp terbit tahun berjalan (Target 40%, Bobot 25%)</p> <p>d. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)</p> <p>e. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 70%, Bobot 25%)*</p> <p>f. Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)*</p>	<p>kegiatan Monitoring dan Evaluasi secara berkala.</p> <p>4. Percepatan penyelesaian pemeriksaan sebelum jangka waktu pemeriksaan berakhir atau melakukan perpanjangan pemeriksaan</p> <p>5. Temuan yang menjadi koreksi hasil pemeriksaan memiliki dasar yang kuat dan disampaikan secara persuasif kepada Wajib Pajak untuk meminimalisir terjadinya sengketa</p> <p>6. Data Potensi DSPP yang dijadikan dasar adalah data yang diusulkan dan disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pemeriksaan, maka perlu menghimbau kepada AR / pihak yang akan mengusulkan pemeriksaan DSPP agar mengusulkan potensi DSPP dengan dasar analisis yang kuat.</p>
				Target telah tercapai.		
13.	Tingkat efektivitas Penagihan	120,00	Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan	<p>1. Memaksimalkan tindakan Penagihan Aktif terutama terhadap Penunggak Pajak terbesar dan/atau terhadap wajib pajak sesuai Daftar Sasaran Pencairan (DSPC)</p> <p>2. Peningkatan tindakan penagihan aktif terhadap SPMP (blokir, sita, lelang)</p>	<p>Capaian IKU Efektivitas Penagihan pada triwulan ini sebesar 120%.</p> <p>Efektivitas Penagihan adalah tindakan penagihan pajak aktif yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam upaya pencairan piutang pajak. Terdiri dari 3</p>	<p>1. Menerbitkan surat teguran dan surat paksa serta tindakan penagihan lainnya atas WP yang masih mempunyai tunggakan pajak</p> <p>2. Memaksimalkan tindakan Penagihan Aktif terutama terhadap Penunggak Pajak terbesar dan/atau terhadap</p>

				Target telah tercapai.	variabel yaitu variabel tindakan penagihan (50%), variabel tindak lanjut DSPC (30%), dan variabel pencairan DSPC (20%). Untuk variabel tindakan penagihan meliputi: i. Penerbitan Surat Teguran; ii. Pemberitahuan Surat Paksa; iii. Pemblokiran; iv. Penyitaan; v. Penjualan Barang Sitaan.	wajib pajak sesuai Daftar Sasaran Pencairan (DSPC)
14.	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00	Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan	Melakukan pembahasan oleh Kasi P3 dan Komite Kepatuhan atas usulan pemeriksaan dari Seksi Pengawasan dan khususnya yang tahun pajaknya mendekati daluwarsa penetapan	1. Persentase Tindak Lanjut Usulan Pemeriksaan dari Kegiatan Pengawasan adalah parameter untuk mengukur interkoneksi antar Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) khususnya Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) dan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP). 2. Persentase Tindak Lanjut Usulan Pemeriksaan dari Kegiatan Pengawasan diukur dengan perbandingan antara target tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan dengan realisasi tindak	1. Menghimbau kepada AR di seksi pengawasan agar menghindari melakukan pengusulan pemeriksaan yang tahun pajaknya mendekati daluwarsa penetapan 2. Menghimbau kepada Pemeriksa Pajak untuk mempercepat penyelesaian pemeriksaan sehingga tersedia ruang terbit. 3. Mempersiapkan bahan usulan bukti permulaan dan segera disampaikan ke Kantor Wilayah

					<p>lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan.</p> <p>3. Target tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan adalah jumlah LHP2DK dengan simpulan dan rekomendasi usulan pemeriksaan khusus seluruh jenis pajak yang telah diusulkan melalui aplikasi Portal P2 dan telah diterima oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pusat untuk dibahas pada rapat Subkomite Pemeriksaan dan Penilaian.</p> <p>4. Realisasi tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan adalah jumlah LHP2DK dengan simpulan dan rekomendasi usulan pemeriksaan khusus seluruh jenis pajak yang telah diusulkan melalui aplikasi Portal P2 dan disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pusat.</p> <p>5. Ruang lingkup usulan pemeriksaan pada IKU ini terbatas pada usulan pemeriksaan yang didasarkan pada LHP2DK hasil tindak</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					lanjut pengawasan dari Daftar Prioritas Pengawasan	
15.	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	120,00	Seksi Pengawasan, Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan, Seksi Penjaminan Kualitas Data	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan kegiatan pengamatan sesuai target yang telah ditentukan</li> <li>Melakukan penerbitan Nota Dinas mengenai Laporan Pengamatan yang sudah dibuat oleh Seksi Pengawasan kepada Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal sebagai salah satu dasar penghitungan realisasi IKU</li> </ol>	Kegiatan pengamatan dimulai pada Triwulan III	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengikuti Bimtek Pengamatan di Kanwil pada tanggal 25 sd 28 Juni 2024</li> <li>IHT/TOK Bimtek Pengamatan kepada seluruh pegawai pada tanggal 18 Juli 2024</li> <li>Menyusun Tim Pengamatan yang terdiri dari seksi pengawasan, fungsional pemeriksa, penilai dan penagihan</li> <li>Menetapkan target kegiatan pengamatan</li> <li>Melaksanakan Kegiatan Pengamatan</li> <li>Mengirimkan Laporan Pengamatan kepada Kanwil DJP Jawa Barat I</li> </ol>
				Target telah tercapai		
16.	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	117,49	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan program ICV sesuai dengan rencana pada awal tahun kemudian di sinkronisasikan dan di laporkan sebagai kegiatan bimbingan mental sesuai dengan ND-770/PJ.11/2024</li> <li>Menugaskan pegawai calon peserta ujian kompetensi untuk mengikuti webinar</li> <li>Memerintahkan seluruh pegawai untuk mengerjakan studia (ND-585/KPP.0911/2024) dan KLC (ND-</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Terdapat dua komponen pendukung IKU ini yaitu Tingkat Kualitas Kompetensi dan Tingkat kualitas pelaksanaan kegiatan/program kebintalan</li> <li>Tingkat Kualitas Kompetensi terdiri dari Tingkat pemenuhan kompetensi manajerial dan social kultural pejabat struktural, pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional juga tingkat pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan program ICV yang kemudian disinkronisasikan dengan program kebintalan pada tahun selanjutnya</li> <li>Membuat Nota Dinas perintah pengerjaan studiA dan e-learning KLC pada seluruh pegawai</li> <li>Mengikut sertakan pegawai yang masih belum memiliki capaian jamlat tatap muka pada diklat, IHT ataupun bimtek</li> </ol>

				647/KPP.0911/2024) untuk memenuhi jam pelatihan tatap muka pegawai pada triwulan I	3. Program Kebintalan (Bimbingan Mental) disesuaikan dengan pelaksanaan program ICV yang sudah direncanakan pada awal tahun	
				Target telah tercapai.		
17.	Indeks Penilaian Integritas Unit	110,72	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring Knowing Your Employee Program ICV;</li> <li>2. Penguatan Integritas Pegawai dan PPNPN melalui pemberian IHT;</li> <li>3. Pelaporan Pemantauan Pengendalian Utama (LHPPU) secara rutin dan menindaklanjuti temuan segera;</li> <li>4. Pemantauan kode etik pegawai dan pemantauan;</li> <li>5. Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi;</li> <li>6. Melakukan Penguatan Integritas Pegawai yang disalurkan melalui media sosial.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Target IKU Indeks Penilaian Integritas Unit Tahun 2024 adalah 85 dengan periode laporan tahunan</li> <li>2. Komponen dalam penghitungan realisasi IKU adalah proporsi dari ((25% x indeks pelayanan perpajakan) + (25% x indeks pengawasan kepatuhan) + (25% x indeks pemeriksaan pajak) + (25% x indeks penagihan pajak)) - Faktor Koreksi</li> <li>4. Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ND Pengendalian internal pada lini pertama</li> <li>2. Melakukan sosialisasi IHT whistle blowing system (saluran pengaduan)</li> <li>3. Membuat dan menempel stiker tolak gratifikasi di beberapa tempat yang mungkin ditemui WP</li> <li>4. Mencetak poster saluran pengaduan di TPT</li> <li>5. Posting layanan gratis dan saluran pengaduan pada media sosial</li> <li>6. Memutar video arahan Dirjen mengenai penguatan integritas pada tiap kegiatan internal maupun eksternal</li> <li>7. Memiliki inovasi e-form integritas pegawai untuk diisi oleh Wajib Pajak</li> <li>8. Monitoring Knowing Your Employee Program ICV;</li> <li>9. Penguatan Integritas Pegawai dan PPNPN melalui pemberian IHT;</li> <li>10. Pelaporan Pemantauan Pengendalian Utama (LHPPU) secara rutin dan</li> </ol>
				Target telah tercapai.		

					disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.	menindaklanjuti temuan segera; 11. Pemantauan kode etik pegawai dan pemantauan; 12. Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi; 13. Melakukan Penguatan Integritas Pegawai yang disalurkan melalui media sosial.
18.	Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan	111,11	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemantauan rencana aksi yang merupakan bagian dari proses Manajemen Risiko</li> <li>2. Melakukan pemantauan terhadap capaian IKU yang masih rendah yaitu IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategisdan IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)</li> </ol>	Capaian IKU Efektivitas DKO dan Rencana Mitigasi Risiko pada tahun ini sebesar 111,11%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pembahasan terkait capaian kinerja setiap bulan</li> <li>2. Melakukan pemantauan rencana aksi yang merupakan bagian dari proses Manajemen Risiko</li> <li>3. Melakukan pemantauan terhadap capaian IKU</li> </ol>
				Target telah tercapai		
19.	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	120,00	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pencairan dana dan pembayaran atas kegiatan yang telah selesai dilaksanakan.</li> <li>2. Melakukan pengajuan Revisi DIPA ke Kanwil DJPb, berupa penyesuaian RPD di Triwulan II disesuaikan dengan target</li> </ol>	Perhitungan penilaian IKPA Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun kedua menggunakan formulasi 3 aspek dengan 8 indikator dari sebelumnya 4 aspek dan 13 indikator. Pengurangan indikator ini bukan mengurangi beban penilaian, namun malah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan rapat Tim Pengelola Keuangan di lingkungan KPP Madya Bandung untuk mengevaluasi penggunaan anggaran, pengadaan barang/jasa, dan pemantauan konsistensi RPD , menentukan target belanja barang/jasa pada periode anggaran Triwulan II</li> </ol>

				<p>penyerapan, dan melakukan pergeseran anggaran untuk menutup pos anggaran yang kurang;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Melakukan percepatan belanja barang dan jasa untuk memenuhi realisasi target penyerapan anggaran;</li> <li>4. Mengadakan Rapat Tim Keuangan secara rutin untuk merencanakan belanja sesuai RPD dan sebagai sarana komunikasi apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan anggaran, serta sarana dalam penyusunan strategi pengelolaan anggaran.</li> <li>5. Membuat kebijakan Uang Harian SPD menjadi 50% sebagai bentuk efisiensi anggaran.</li> </ol>	<p>menjadikannya lebih sulit dikarenakan penilaian per indikator yang sangat detil dan memiliki bobot masing-masing. Terutama terkait indikator revisi anggaran, pengelolaan UP dan TUP, Deviasi halaman III DIPA, dan Penyerapan Anggaran yang rumus penilaiannya sangat rumit.</p>	<p>dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2023, 16 Juni 2023 dan 30 Juni 2023</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Telah melakukan revisi Halaman III DIPA untuk memutakhirkan RPD di Triwulan I sehingga meminimalisir terjadinya deviasi lebih dari yang diperkenankan (5%). Selain itu, juga dilakukan revisi untuk menetapkan RPD di Triwulan II sesuai hasil rapat pengelola anggaran untuk realisasi anggaran di Triwulan II.</li> <li>3. Telah melakukan revisi anggaran diantaranya penambahan anggaran untuk honorarium PPNPN sesuai dengan UMK Kota Bandung, selanjutnya memunculkan akun sewa printer, dan test urine.</li> <li>4. Me-manage capaian output Triwulan I dan target penyerapan Triwulan I</li> <li>5. Memenuhi target penyerapan anggaran Triwulan I dengan perhitungan rumusan IKPA Tahun 2023.</li> <li>6. Melakukan revisi anggaran untuk menyesuaikan nilai RPD Triwulan I agar sesuai dengan realisasi anggaran.</li> <li>7. Melakukan percepatan penyerapan anggaran Tahun 2023.</li> </ol>
				<p>Target telah tercapai</p>		

						<ol style="list-style-type: none"><li>8. Melaksanakan percepatan kegiatan, seperti pelaksanaan ICV Team Building, Tax Gathering, Pengadaan Seragam Dinas dsb, untuk mencapai target penyerapan dan RPD.</li><li>9. Melakukan koordinasi dengan pemilik proses bisnis dalam hal pemenuhan target capaian output di triwulan II.</li><li>10. Berkoordinasi dengan kantor wilayah, kantor pelayanan pajak lain, dan KPPN dalam mencari upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran.</li></ol>
--	--	--	--	--	--	---

### Pelaksanaan Rencana Aksi atau Mitigasi Risiko Tahun 2024

No	Kejadian Risiko	Mitigasi Risiko	Realisasi s.d. Triwulan IV	Waktu Pelaksanaan	Dokumen Pendukung	Penanggung Jawab
1.1	Penerimaan pajak netto tidak mencapai target	Monitoring dan Evaluasi rencana kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa ( PPM) dan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100%	1. 1 Februari 2024 2. 1 Februari 2024 3. 15 Maret 2024 4. 16 Mei 2024 5. 19 Juni 2024 6. 30 Mei 2024 7. 19 Agustus 2024 8. 21 Agustus 2024 9. 18 September 2024 10. 17 September 2024 11. 13 September 2024 12. 9 Desember 2024 13. 13 November 2024 14. 13 November 2024 15. 30 Oktober 2024 16. 22 Oktober 2024 17. 11 Oktober 2024	1. ND-271/KPP.0911.2024 2. ND-284/KPP.0911/2024 3. ND-598/KPP.0911/2024 4. ND-969/KPP.0911/2024 5. ND-1202/KPP.0911/2024 6. ND-1028/KPP.0911/2024 7. ND-1656/KPP.0911/2024 8. ND-1682/KPP.0911/2024 9. ND-1855/KPP.0911/2024 10. ND-1854/KPP.0911/2024 11. ND-1846/KPP.0911/2024 12. ND-2341/KPP.0911/2024 13. ND-2240/KPP.0911/2024 14. ND-2241/KPP.0911/2024 15. ND-2132/KPP.0911/2024 16. ND-2090/KPP.0911/2024 17. ND-2012/KPP.0911/2024	1. Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data 2. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan 3. Kepala Seksi Pengawasan I 4. Kepala Seksi Pengawasan II 5. Kepala Seksi Pengawasan III 6. Kepala Seksi Pengawasan IV 7. Kepala Seksi Pengawasan V 8. Kepala Seksi Pengawasan VI

2.1	Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai	Nota Dinas Instruksi Melakukan Monitoring Pencapaian SPT Tahunan	100%	1. 1 Februari 2024 2. 19 Maret 2024 3. 25 Maret 2024 4. 28 Maret 2024 5. 5 Februari 2024 6. 18 April 2024 7. 25 April 2024 8. 30 April 2024	1. ND-37/KPP.091103/2024 2. ND-67/KPP.091103/2024 3. ND-71/KPP.091103/2024 4. ND-80/KPP.091103/2024 5. ND-39/KPP.091103/2024 6. ND-97/KPP.091103/2024 7. ND-106/KPP.091103/2024 8. ND-118/KPP.091103/2024	1. Kepala Seksi Pelayanan
2.1	Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai	Menyusun rencana strategis Pencapaian Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan/OP	100%	19 Januari 2024	1. ND-177/KPP.0911/2024	1. Kepala Seksi Pelayanan 2. Kepala Seksi Pengawasan I 3. Kepala Seksi Pengawasan II 4. Kepala Seksi Pengawasan III 5. Kepala Seksi Pengawasan IV 6. Kepala Seksi Pengawasan V 7. Kepala Seksi Pengawasan VI 8. Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data
3.1	Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) terhadap penerimaan tidak mencapai target	Mengoptimalkan fungsi Komite Kepatuhan Wajib Pajak yang lebih berkualitas	100%	1. 19 Januari 2. 7 Juni 2024 3. 30 Mei 2024 4. 19 April 2024 5. 17 September 2024 6. 8 November 2024 7. 11 Desember 2024	1. ND-171/KPP.0911/2024 2. ND-1086/KPP.0911/2024 3. ND-1028/KPP.0911/2024 4. ND-815/KPP.0911/2024 5. ND-1854/KPP.0911/2024 6. ND-2207/KPP.0911/2024 7. ND-2344/KPP.0911/2024	1. Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data
3.1	Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) terhadap penerimaan tidak mencapai target	Mengadakan Monitoring dan Evaluasi	100%	1. 7 Maret 2024 2. 1 Februari 2024 3. 15 Maret 2024 4. 20 Mei 2024 5. 16 Mei 2024 6. 19 Juni 2024 7. 19 Agustus 2024 8. 21 Agustus 2024	1. ND-581/KPP.0911/2024 2. Screenshot undangan rapat Monev Pengawasan dan Monev Pemeriksaan 3. Screenshot undangan rapat Monev Pengawasan dan Monev Pemeriksaan 4. ND-989/KPP.0911/2024	1. Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data

				<p>9. 13 September 2024  10. 18 September 2024  11. 17 September 2024  12. 9 Desember 2024  13. 13 November 2024  14. 13 November 2024  15. 30 Oktober 2024  16. 22 Oktober 2024  17. 11 Oktober 2024</p>	<p>5. ND-969/KPP.0911/2024  6. ND-1202/KPP.0911/2024  7. ND-1656/KPP.0911/2024  8. ND-1682/KPP.0911/2024  9. ND-1846/KPP.0911/2024  10. ND-1855/KPP.0911/2024  11. ND-1854/KPP.0911/2024  12. ND-2341/KPP.0911/2024  13. ND-2240/KPP.0911/2024  14. ND-2241/KPP.0911/2024  15. ND-2132/KPP.0911/2024  16. ND-2090/KPP.0911/2024  17. ND-2012/KPP.0911/2024</p>	
3.1	Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) terhadap penerimaan tidak mencapai target	Mengadakan kolaborasi pengawasan dan pemeriksaan melalui kegiatan bedah wajib pajak untuk meajamkan analisa potensi PKM	<b>100%</b>	<p>1. 19 Maret 2024  2. 20 Juni 2024</p>	<p>1. ND-650/KPP.0911/2024  2. ND-1220/KPP.0911/2024</p>	<p>1. Kepala Seksi Pelayanan  2. Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data</p>
4.1	Kegiatan edukasi yang dilaksanakan belum sepenuhnya mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak	Menyusun rencana kerja sosialisasi kepada seluruh Wajib Pajak	<b>100%</b>	<p>1. 4 Januari 2024</p>	<p>1. Rencana Kerja Aplikasi Sisuluh</p>	<p>1. Kepala Seksi Pelayanan  2. Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data</p>
4.1	Kegiatan edukasi yang dilaksanakan belum sepenuhnya mampu meningkatkan	Mengoptimalkan edukasi dan penyuluhan tema 3 tentang perubahan perilaku dengan metode one on one	<b>100%</b>	<p>1. 27 Maret 2024  2. 30 Juni 2024  3. 30 Juli &amp; 30 September 2024  4. 2 Oktober 2024</p>	<p>1. Laporan MPKP pelaksanaan edukasi dan penyuluhan di aplikasi Sisuluh  2. Laporan MPKP pelaksanaan edukasi dan</p>	<p>1. Kepala Seksi Pelayanan  2. Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data</p>

	kepatuhan Wajib Pajak				penyuluhan di aplikasi Sisuluh 3. Laporan MPKP pelaksanaan edukasi dan penyuluhan di aplikasi Sisuluh 4. Laporan MPKP pelaksanaan edukasi dan penyuluhan di aplikasi Sisuluh	
4.1	Kegiatan edukasi yang dilaksanakan belum sepenuhnya mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak	Lebih detail dan lebih teliti dalam pemilihan DSPT	<b>100%</b>	1. 20 Februari 2024 2. 30 Juni 2024 3. 30 Juni 2024 4. 30 Juni 2024 5. 01 September 2024 6. 2 Oktober 2024	1. Penetapan DSPT Kolaborasi pada aplikasi Sisuluh 2. Penetapan DSPT Kolaborasi pada aplikasi Sisuluh 3. CRMIRE 4. Approweb 5. Penetapan DSPT Kolaborasi pada aplikasi Sisuluh. CRMIRE, Approweb 6. Penetapan DSPT Kolaborasi pada aplikasi Sisuluh. CRMIRE, Approweb	1. Kepala Seksi Pelayanan 2. Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data
4.1	Kegiatan edukasi yang dilaksanakan belum sepenuhnya mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak	Update data wajib Pajak	<b>100%</b>	1. 5 Februari 2024 2. 18 April 2024 3. 25 April 2024 4. 30 April 2024	1. ND-39/KPP.091103/2024 2. ND-97/KPP.091103/2024 3. ND-106/KPP.091103/2024 4. ND-118/KPP.091103/2024	1. Kepala Seksi Pelayanan 2. Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data
5.1	Realisasi pengawasan pembayaran masa WP Strategis tidak memenuhi target yang ditetapkan	Monitoring dan Evaluasi atas daftar nominatif PPM	<b>100%</b>	1. 24 Januari 2024 2. 3 April 2024 3. 6 Mei 2024 4. 6 Juni 2024	1. ND-6/KPP.091102/2024 2. ND-18/KPP.091102/2024 3. ND-21/KPP.091102/2024 4. ND-26/KPP.091102/2024	1. Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data 2. Kepala Seksi Pengawasan I 3. Kepala Seksi Pengawasan II 4. Kepala Seksi Pengawasan III 5. Kepala Seksi Pengawasan IV 6. Kepala Seksi Pengawasan V 7. Kepala Seksi Pengawasan VI

6.1	Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)/DSP4 terhadap penerimaan tidak mencapai target	Monitoring atas SP2DK yang tidak direspon oleh wajib pajak dengan usulan pemeriksaan	<b>100%</b>	1. 7 Juni 2024 2. 21 November 2024	1. ND-1088/KPP.0911/2024 2. ND-2280/KPP.0911/2024	1. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan
7.1	Realisasi pencairan piutang pajak tidak mencapai target	Optimalisasi 100 wajib pajak penunggak pajak terbesar	<b>100%</b>	1. 1 Januari s.d. 31 Maret 2024 2. 1 Januari 2024 s.d. 25 Juni 2024 3. 1 Januari 2024 s.d. 25 September 2024 4. 1 Januari 2024 s.d. 24 Desember 2024	1. Register Surat Paksa 2. Register Surat Paksa 3. Register Surat Paksa 4. Register Surat Paksa	1. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan
7.2	Realisasi nilai ketetapan dibayar dari kegiatan pemeriksaan tidak mencapai target	Melakukan rapat monitoring dan evaluasi kinerja pemeriksaan	<b>100%</b>	1. 1 Februari 2024 2. 1 Februari 2024 3. 15 Maret 2024 4. 16 Mei 2024 5. 19 Juni 2024 6. 19 Agustus 2024 7. 13 September 2024 8. 10 Juli 2024 9. 5 Agustus 2024 10. 11 Oktober 2024 11. 13 November 2024 12. 9 Desember 2024	1. ND-271/KPP.0911.2024 2. ND-284/KPP.0911.2024 3. ND-598/KPP.0911.2024 4. ND-969/KPP.0911.2024 5. ND-1202/KPP.0911.2024 6. ND-1656/KPP.0911/2024 7. ND-1846/KPP.0911/2024 8. ND-1295/KPP.0911/2024 9. ND-1629/KPP.0911/2024 10. ND-2012/KPP.0911/2024 11. ND-2240/KPP.0911/2024 12. ND-2341/KPP.0911/2024	1. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan
8.1	Realisasi Kegiatan Pengamatan Tidak Mencapai Target	menyelenggarakan Kegiatan IHT untuk Fungsional Pemeriksa dan AR	<b>100%</b>	1. 13 Februari 2024 2. 9 Juli 2024	1. ST-128/KPP.0911/2024 2. ND-1339/KPP.0911/2024	1. Kepala Seksi Pengawasan II

9.1	Adanya pegawai yang tidak memenuhi standar kompetensi	Memberikan bimbingan kepada pegawai yang akan mengikuti uji kompetensi dan assessment	100%	1. 13 Februari 2024	1. ST-128/KPP.0911/2024	1. Kepala Subbagian Umum dan Keadpatuhan Internal
10.1	Pegawai belum siap dalam mengimplementasikan sistem probis (PSIAP) terbaru	Melaksanakan pelatihan Aplikasi PSIAP kepada para pegawai	100%	1. 15 Maret 2023 2. 8 Mei 2024 3. 6,8,9 Agustus 2024 4. 18 November 2024 5. 18 Oktober 2024 6. 14 Oktober 2024 7. 9 Oktober 2024 8. 18 Oktober 2024	1. ST-213/KPP.0911/2024 2. ND-1227/PJ.11/2024 3. ND-1544/KPP.0911/2024 4. ND-2269/KPP.0911/2024 5. ND-2065/KPP.0911/2024 6. ND-2014/KPP.0911/2024 7. ND-1996/KPP.0911/2024 8. ND-2069/KPP.0911/2024	1. Kepala Subbagian Umum dan Keadpatuhan Internal 2. Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data 3. Kepala Seksi Pengawasan I 4. Kepala Seksi Pengawasan II 5. Kepala Seksi Pengawasan III 6. Kepala Seksi Pengawasan IV 7. Kepala Seksi Pengawasan V 8. Kepala Seksi Pengawasan VI 9. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan 10. Kepala Seksi Pelayanan
10.2	Predikat pembangunan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM) tidak tercapai	Mengadakan rapat/sosialisasi pembangunan ZI-WBBM KPP Madya Bandung	100%	1. 31 Januari 2024 2. 26 Maret 2024	1. ND-263/KPP.0911/2024 2. ND-666/KPP.0911/2024	1. Kepala Subbagian Umum dan Keadpatuhan Internal
10.2	Predikat pembangunan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM) tidak tercapai	Mengadakan sosialisasi dan public campaign pembangunan ZI-WBBM KPP Madya Bandung ke Wajib Pajak	100%	1. 15 Mei 2024 2. 26 Juni 2024	1. ST-375/KPP.0911/2024 & LAP-99/KPP.0911/2024 2. S-753/KPP.0911/2024 & LAP-113/KPP.0911/2024	1. Kepala Subbagian Umum dan Keadpatuhan Internal
10.2	Predikat pembangunan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-	Mengadakan sharing session dengan unit kerja lain (KPP dan Kanwil) terkait pembangunan ZI-WBBM	100%	1. 14 Juni 2024	1. ST-461/KPP.0911/2024	1. Kepala Subbagian Umum dan Keadpatuhan Internal

	WBBM) tidak tercapai					
10.2	Predikat pembangunan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM) tidak tercapai	Menciptakan inovasi layanan berdasarkan dokumen lembar kerja evaluasi pembangunan ZI-WBBM	100%	-	-	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
10.3	Adanya tangkapan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat	Melakukan ICV Nilai-Nilai Kementerian Keuangan	100%	1. 11 Januari 2024 2. 26 Januari 2024 3. 31 Januari 2024 4. 13 Februari 2024 5. 23 Februari 2024 6. 26 Februari 2024 7. 5 Maret 2024 8. 8 Maret 2024 9. 24 Juni 2024 10. 15 Mei 2024 11. 17 Mei 2024 12. Selama Bulan Mei 13. Selama Bulan Juni 14. 29 Mei 2024 15. 12 Juni 2024 16. 26 April 2024 17. 31 Mei 2024 18. 14 Juni 2024 19. Selama Bulan Juli 2024 20. 30 Juli 2024 21. Selama Bulan Agustus 2024 22. 26 Agustus 2024 23. Selama Bulan September 2024 24. 11 September 2024 25. 30 September 2024 26. 11 Juli 2024	1. ND-116/KPP.0911/2024 2. ND-248/KPP.0911/2024 3. ND-263/KPP.0911/2024 4. ND-367/KPP.0911/2024 5. ND-472/KPP.0911/2024 6. ND-481/KPP.0911/2024 7. ND-549/KPP.0911/2024 8. ND-587/KPP.0911/2024 9. ND-1232/KPP.0911/2024 10. ND-974/KPP.0911/2024 11. ND-975/KPP.0911/2024 12. ND-757/KPP.0911/2024 13. ND-1018/KPP.0911/2024 14. ND-1011/KPP.0911/2024 15. ND-1097/KPP.0911/2024 16. ND-864/KPP.0911/2024 17. ND-1026/KPP.0911/2024 18. ND-1189/KPP.0911/2024 19. ND-1261/KPP.0911/2024 20. ND-1454/KPP.0911/2024 21. ND-1511/KPP.0911/2024	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

				<p>27. 10-11 Juli 2024  28. 4 Oktober 2024  29. 5 November 2024  30. 10 Desember 2024  31. 25 Oktober 2024  32. 14 November 2024  33. 20 Desember 2024  34. Selama bulan Oktober  35. Selama bulan November  36. Selama bulan Desember</p>	<p>22. ND-1720/KPP.0911/2024  23. ND-1792/KPP.0911/2024  24. ND-1805/KPP.0911/2024  25. ND-1926/KPP.0911/2024  26. ND-1347/KPP.0911/2024  27. ND-1309/KPP.0911/2024  28. ND-1953/KPP.0911/2024  29. ND-2142/KPP.0911/2024  30. ND-2337/KPP.0911/2024  31. ND-2114/KPP.0911/2024  32. ND-2247/KPP.0911/2024  33. ND-2373/KPP.0911/2024  34. ND-1924/KPP.0911/2024  35. ND-2121/KPP.091/2024  36. ND-2299/KPP.0911/2024</p>	
10.3	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat	Mengirimkan Nota Dinas imbauan Kepala Kantor kepada seluruh pegawai untuk memegang teguh nilai kode etik dan disiplin dalam menjalankan tugas sehari-hari	<b>100%</b>	1. 1 April 2024	1. ND-762/KPP.0911/2024	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

10.3	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat	Mengirimkan Nota Dinas imbauan Kepala Kantor kepada seluruh pegawai untuk melaksanakan pengendalian intern pada Lini Pertama	100%	1. 16 Januari 2024 2. 28 Juni 2024 3. 20 September 2024 4. 27 Desember 2024	1. ND-139/KPP.0911/2024 2. ND-1263/KPP.0911/2024 3. ND-1888/KPP.0911/2024 4. ND-2420/KPP.0911/2024	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
10.3	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat	Mengadakan IHT Penguatan Integritas	100%	1. 11 Januari 2024 2. 17 Mei 2024 3. 4 Oktober 2024	1. ND-116/KPP.0911/2024 2. ND-975/KPP.0911/2024 3. ND-1953/KPP.0911/2024	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
10.4	Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi	Melakukan ICV Nilai-Nilai Kementerian Keuangan	100%	1. 11 Januari 2024 2. 26 Januari 2024 3. 31 Januari 2024 4. 13 Februari 2024 5. 23 Februari 2024 6. 26 Februari 2024 7. 5 Maret 2024 8. 8 Maret 2024 9. 24 Juni 2024 10. 15 Mei 2024 11. 17 Mei 2024 12. Selama bulan Mei 13. Selama bulan Juni 14. 29 Mei 2024 15. 12 Juni 2024 16. 26 April 2024 17. 31 Mei 2024 18. 14 Juni 2024 19. Selama Bulan Juli 20. 30 Juli 2024 21. Selama Bulan Agustus 22. 26 Agustus 2024	1. ND-116/KPP.0911/2024 2. ND-248/KPP.0911/2024 3. ND-263/KPP.0911/2024 4. ND-367/KPP.0911/2024 5. ND-472KPP.0911/2024 6. ND-481/KPP.0911/2024 7. ND-549/KPP.0911/2024 8. ND-587KPP.0911/2024 9. ND-1232/KPP.0911/2024 10. ND-974/KPP.0911/2024 11. ND-975/KPP.0911/2024 12. ND-757/KPP.0911/2024 13. ND-1018/KPP.0911/2024 14. ND-1011/KPP.0911/2024 15. ND-1097/KPP.0911/2024 16. ND-864/KPP.0911/2024 17. ND-1026/KPP.0911/2024 18. ND-1189/KPP.0911/2024	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

				<p>23. Selama Bulan September</p> <p>24. 11 September 2024</p> <p>25. 30 September 2024</p> <p>26. 11 Juli 2024</p> <p>27. 10 - 11 Juli 2024</p> <p>28. 4 Oktober 2024</p> <p>29. 10 Desember 2024</p> <p>30. 25 Oktober 2024</p> <p>31. 14 November 2024</p> <p>32. 20 Desember 2024</p> <p>33. Selama Bulan Oktober</p> <p>34. Selama Bulan November</p> <p>35. Selama Bulan Desember</p>	<p>19. ND-1261/KPP.0911/2024</p> <p>20. ND-1454/KPP.0911/2024</p> <p>21. ND-1511/KPP.0911/2024</p> <p>22. ND-1720/KPP.0911/2024</p> <p>23. ND-1792/KPP.0911/2024</p> <p>24. ND-1805/KPP.0911/2024</p> <p>25. ND-1926/KPP.0911/2024</p> <p>26. ND-1347/KPP.0911/2024</p> <p>27. ND-1309/KPP.0911/2024</p> <p>28. ND-2142/KPP.0911/2024</p> <p>29. ND-2337/KPP.0911/2024</p> <p>30. ND-2114/KPP.0911/2024</p> <p>31. ND-2247/KPP.0911/2024</p> <p>32. ND-2373/KPP.0911/2024</p> <p>33. ND-1924/KPP.0911/2024</p> <p>34. ND-2121/KPP.091/2024</p> <p>35. ND-2299/KPP.0911/2024</p>	
10.4	Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi	Mengirimkan Nota Dinas imbauan Kepala Kantor kepada seluruh pegawai untuk memegang teguh nilai kode etik dan disiplin dalam menjalankan tugas sehari-hari	<b>100%</b>	1. 1 April 2024	1. ND-762/KPP.0911/2024	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

10.4	Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi	Mengirimkan Nota Dinas imbauan Kepala Kantor kepada seluruh pegawai untuk melaksanakan pengendalian intern pada Lini Pertama	100%	1. 16 Januari 2024 2. 28 Juni 2024	1. ND-139/KPP.0911/2024 2. ND-1263/KPP.0911/2024	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
11.1	Rendahnya efisiensi pelaksanaan anggaran	Mengadakan rapat intern tim keuangan	100%	1. 30 Januari 2024 2. 14 Maret 2024 3. 8 November 2024	1. Notula Rapat Pembahasan Pengelolaan Keuangan 2024 2. ND-607/KPP.0911/2024 3. ND-2211/KPP.0911/2024	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
<b>Persentase Rencana Mitigasi Risiko yang Selesai Dijalankan</b>			<b>100,00 %</b>			































## **B. Realisasi Anggaran**

Rincian Laporan Realisasi Anggaran KPP Madya Bandung untuk tahun 2024 disajikan pada lampiran II.



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024  
(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : KEMENTERIAN KEUANGAN 015  
**ESELON I** : DITJEN PAJAK 04  
**SATUAN KERJA** : KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BANDUNG 449803

Tgl Data : 23/01/25 6:54 AM  
Tgl Cetak : 23/01/25 2:38 PM  
Halaman : 2  
lap\_fra\_face\_satker\_new\_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)</b>	<b>5,330,364,000</b>	<b>5,286,731,374</b>	<b>(43,632,626)</b>	<b>99</b>	<b>5,019,130,000</b>	<b>4,565,578,253</b>	<b>453,551,747</b>	<b>91</b>
<b>C. PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Keterangan :

FINAL

Bandung, 23 Januari 2025  
Penanggung Jawab UAKPA  
kpa

NANDANG HIDAYAT  
NIP 196909081996031001

## BAB IV

### PENUTUP

Selain berhasil mencapai Nilai Kinerja Organisasi dengan melampaui target atau diatas 100%, sepanjang tiga tahun terakhir KPP Madya Bandung juga menerima beberapa penghargaan dan *achievement*. KPP Madya Bandung berhasil meraih sebanyak total 38 penghargaan, baik atas nama unit kerja maupun atas nama pegawai KPP Madya Bandung. Penghargaan yang didapat terdiri dari berbagai macam tingkat baik regional maupun nasional. Berikut rincian penghargaan-penghargaan yang pernah diraih oleh KPP Madya Bandung selama beberapa tahun terakhir:

1. Kantor Pelayanan Terbaik tingkat Kanwil DJP Jawa Barat I Tahun 2023;
2. Unit Kerja dengan Pengiriman Berkas Keberatan dan Non Keberatan Terbaik II tingkat Kanwil DJP Jawa Barat I Tahun 2023;
3. Unit Kerja dengan Kontribusi Realisasi DPP Terbesar pada PKM Pengawasan Terbaik III tingkat Kanwil DJP Jawa Barat I Tahun 2023;
4. Unit Kerja dengan Kinerja Penagihan Terbaik III tingkat Kanwil DJP Jawa Barat I Tahun 2023;
5. Unit Kerja dengan Kontribusi Realisasi DPP Terbesar pada PKM Pengawasan Terbaik III tingkat Kanwil DJP Jawa Barat I Tahun 2023;
6. Satker dengan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sempurna (Nilai 100) dalam Kinerja Pelaksanaan Anggaran Periode Semester 2 Tahun 2023;
7. Satker dengan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sempurna (Nilai 100) dalam Kinerja Pelaksanaan Anggaran Periode Semester 1 Tahun 2023;
8. Penghargaan Jurusita Pajak Negara dengan Kinerja Penagihan Pajak – Cluster KPP Madya Tahun 2023 a.n. Irvan Sofwan;
9. Kepala Seksi Strategis KPP Madya dengan Nilai Kinerja Tertinggi tahun 2023 kepada Ibu Suci Lesari Hakam dan Bapak Dedi Supriyadi;
10. Juara I Lomba HORI cabang Bilyard a.n. Yanianto Dwi Candradi Dan Sukri Alimudin
11. *Account Representative* Strategis terbaik tingkat Kanwil DJP Jawa Barat I Tahun 2023 a.n. Iwan Dermawan;
12. Pelaksana terbaik tingkat Kanwil DJP Jawa Barat I Tahun 2023 a.n. Annisa Asisiura;
13. Satker dengan Capaian IKPA Sempurna tingkat Provinsi Jawa Barat Semester I Tahun 2022 diberikan oleh Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat;
14. Juara Harapan Kantor Pelayanan Terbaik Tingkat Kanwil DJP Jawa Barat I Tahun 2022;

15. Terbaik I dalam kegiatan Bedah Wajib Pajak Group Lintas Kantor Pelayanan Pajak Tingkat Kanwil DJP Jawa Barat I Tahun 2022;
16. Penghargaan individu atas nama Dhias Prayoga dan Ceppy sebagai *Account Representative* Strategis Terbaik tingkat Nasional Tahun 2022;
17. Peringkat 1 Kinerja Penyuluhan Terbaik tingkat Kanwil DJP Jawa Barat Tahun 2021;
18. Peringkat 3 Unit Kerja UKI Terbaik tingkat Kanwil DJP Jawa Barat Tahun 2021;
19. Peringkat 2 Kinerja Pelaksanaan Anggaran TA 2021 diberikan oleh oleh Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat;
20. Peringkat 5 Capaian IKPA Tertinggi tingkat Provinsi Jawa Barat Semester II Tahun 2021 diberikan oleh oleh Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat;
21. Capaian IKPA Semester I Tertinggi tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2021;
22. Juara II Kantor Pelayanan Terbaik Tingkat Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I Tahun 2021;
23. Penghargaan Individu atas nama Dedi Supriadi sebagai Kepala Seksi Pengawasan Madya Terbaik Pertama Tahun 2021 tingkat Kanwil DJP Jawa Barat I;
24. Penghargaan Individu atas nama Dikdik Kuswandi sebagai AR WP Strategis Terbaik Kedua Tahun 2021 tingkat Kanwil DJP Jawa Barat I;
25. Penghargaan Individu atas nama Leo Fatra Nugraha sebagai Fungsional Penyuluh Pajak Terbaik Pertama Tahun 2021 tingkat Kanwil DJP Jawa Barat I;
26. Pengelolaan Unit Kepatuhan Internal Terbaik ke-1 Tahun 2020 tingkat Kanwil DJP Jawa Barat I;
27. Pengemasan Dokumen Non SPT Terbaik ke-1 Tahun 2020 tingkat Kanwil DJP Jawa Barat I;
28. Indeks Kepuasan Pelayanan Umum Tertinggi ke-1 Tahun 2020 tingkat Kanwil DJP Jawa Barat I;
29. Kinerja Anggaran Terbaik ke-2 Tahun 2020 tingkat Kanwil DJP Jawa Barat I;
30. Capaian Jam Pelatihan Terbaik ke-2 Tahun 2020 tingkat Kanwil DJP Jawa Barat I;
31. Pengelolaan Ruang Berkas Terbaik ke-3 Tahun 2020 tingkat Kanwil DJP Jawa Barat I;
32. Persentase Penyelesaian Tindakan Penagihan Aktif Terbaik ke-3 Tahun 2020 tingkat Kanwil DJP Jawa Barat I;
33. Kinerja Rasio Kepatuhan SPT Tahunan Melebihi 100% Tahun 2020 tingkat Kanwil DJP Jawa Barat I;
34. Penghargaan atas Kinerja Melebihi Target atas Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan WP Badan dan Orang Pribadi Tahun 2020 oleh Menteri Keuangan;

35. Penghargaan individu atas nama Muhammad Fauzi sebagai Kepala Seksi Penagihan Terbaik Tahun 2020 tingkat Kanwil DJP Jawa Barat I;
36. Penghargaan individu atas nama Rizky Fajri sebagai *Account Representative* Strategis Terbaik Tahun 2020 tingkat Kanwil DJP Jawa Barat I;
37. Penghargaan individu atas nama Clais Budi Santoso (Alm.) sebagai Anggota Tim Pemeriksaan Terbaik Tahun 2020 tingkat Kanwil DJP Jawa Barat I; dan
38. Penghargaan individu atas nama Siska Deivi Haryanti sebagai Sekretaris Terbaik Tahun 2020 tingkat Kanwil DJP Jawa Barat I.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja organisasi yang mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020-2024

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pajak Madya Bandung tahun 2024 merupakan hasil evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran yang berisikan tentang kegiatan pelaksanaan tugas di bidang administrasi dan kebijakan perpajakan yang tertuang dalam wujud perencanaan dan pemenuhan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Akan tetapi akan selalu ada faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam kaitan pelaksanaan pekerjaan. Sebagian indikator kinerja dapat dipenuhi dengan baik tetapi sebagian juga ada yang masih berada di bawah target.

Dengan disusunnya LAKIN ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada jajaran pimpinan Direktorat Jenderal Pajak khususnya di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I dan juga semua pihak pemangku kepentingan Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung terkait tugas dan fungsi. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.

Bandung, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya  
Bandung



Ditandatangani secara elektronik

Nandang Hidayat



**Lampiran I**  
**Perjanjian Kontrak Kinerja**



